

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ukuran yang sering digunakan sebagai indikator pembangunan adalah pendapatan per kapita. Selain dapat membedakan antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang, pendapatan per kapita (walaupun sangat kasar) dianggap pula dapat memberikan gambaran tentang perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara atau antara negara. Suatu negara dianggap berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi, yakni dilihat dari produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) (Santi, 2001).

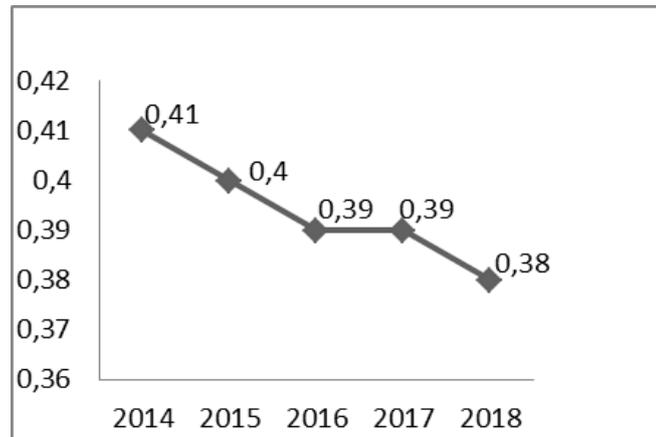
Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006:22)

Selain pendapatan per kapita, distribusi pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat, dimana distribusi pendapatan adalah suatu konsep penyebaran pendapatan diantara setiap orang atau rumah tangga yang ada di dalam masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan

dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara maju, pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatannya cenderung menurun, akan tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan itu menjadi lebih baik.

Dalam perencanaan pembangunan, masalah yang perlu mendapat perhatian bukan hanya bagaimana mencapai produktivitas tinggi tetapi juga bagaimana agar distribusi pendapatan relatif merata sekaligus memperhatikan nasib penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi pertumbuhan (produktivitasnya), pendapatan juga terdistribusi relatif merata.

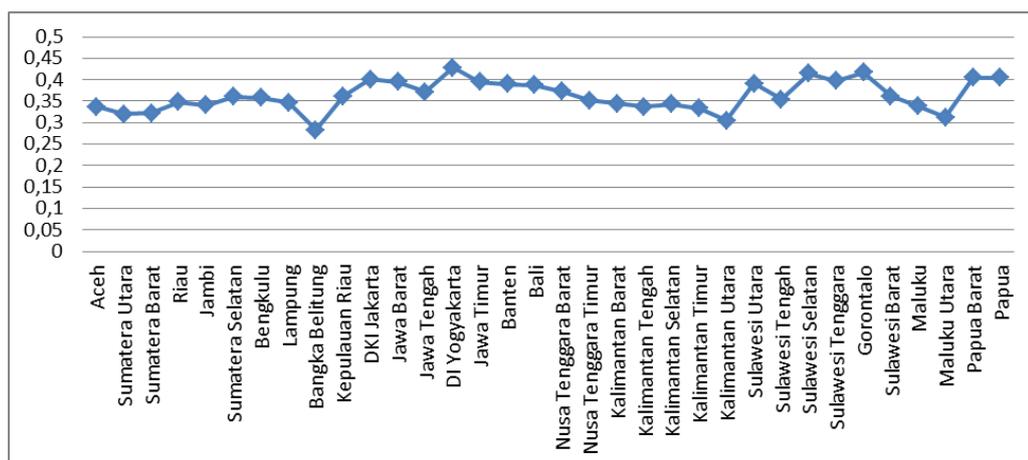
Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan distribusi pendapatan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya lebih baik, sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Distribusi pendapatan ini sendiri dilihat dari tingkat ketimpangannya, yang di ukur menggunakan indeks rasio gini.



Sumber: BPS, 2019

Gambar 1.1
Rasio Gini Indonesia

Di Indonesia nilai ketimpangan masih tergolong rendah berdasarkan gambar 1.1 rasio gini dari tahun ke tahun nilainya terus menurun, meski pada tahun 2014 nilai rasio gini masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, tetapi pada tahun berikutnya nilainya menurun secara signifikan. Nilai rasio gini nasional yang rendah tersebut ditunjang dengan rasio gini provinsi yang tergolong rendah juga.



Sumber : BPS, 2019

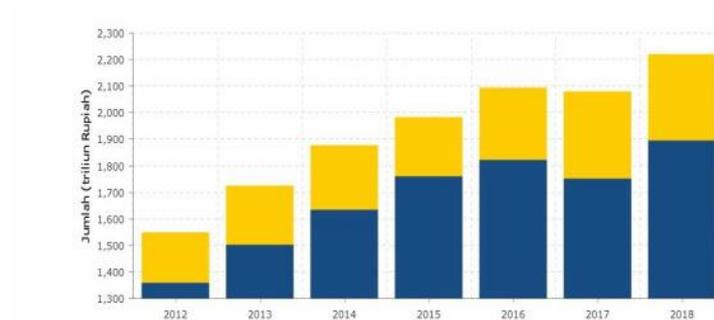
Gambar 1.2
Rata-Rata Rasio Gini Provinsi

Dari gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa 5 tahun terakhir tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia ini cukup stabil, dilihat dari grafiknya tidak ada daerah atau provinsi yang mengalami penurunan atau kenaikan ketimpangan yang drastis hanya sedikit perubahan-perubahan kecil yang tidak mengubah tingkat ketimpangannya. Meski dari tahun ke tahun terlihat stabil tapi distribusi pendapatan masih belum merata. Hal tersebut juga dapat terlihat di Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki nilai rasio gini lebih besar dari provinsi lainnya dan juga lebih besar dari nilai rasio gini nasional. Karena nilai ketimpangannya tinggi artinya perekonomian di Provinsi DI Yogyakarta masih terpusat di perkotaan. Selain itu terdapat provinsi yang nilai ketimpangannya paling rendah dari yang lainnya, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Nilai tersebut juga lebih rendah dari nilai ketimpangan nasional artinya pendapatan masyarakat sudah cukup merata di Provinsi Bangka Belitung.

Distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pengeluaran dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. Dimana APBN adalah alat utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus alat utama pemerintah untuk mengelola perekonomian negara (Suminto 2004).

Karena tugasnya sebagai alat untuk mengatur perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka APBN ini dapat dikatakan sebagai instrumen penting dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah

tidak hanya di pusat tapi juga di daerah yang tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang juga sama seperti pemerintah pusat, pengeluaran tersebut dibedakan menjadi kelompok belanja dan kelompok pembiayaan.

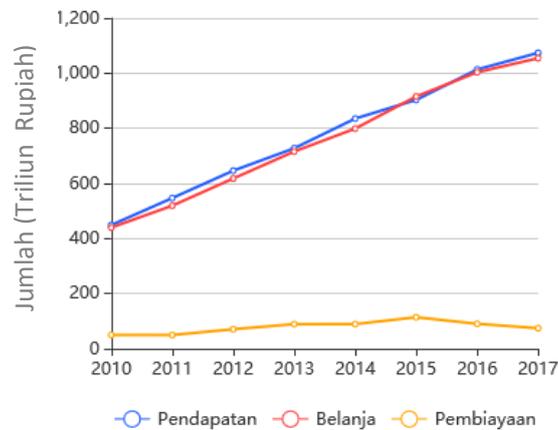


Sumber : DJPK, 2018

Gambar 1.3
Data APBN

Dari gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun anggaran penerimaan dan belanja negara ini mengalami kenaikan yang memang diikuti dengan program pemerintah yang saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Pada tahun 2017 APBN mengalami penurunan karena pemerintah memberlakukan kebijakan ekspansi fiskal salah satunya dengan memangkas anggaran belanja, sehingga APBN tahun 2017 lebih kecil dari tahun sebelumnya (Kementrian Keuangan, 2018). Kenaikan dana APBN ini juga diikuti dengan kenaikan dana APBD dari masing-masing provinsi.



Sumber: DJPK, 2017

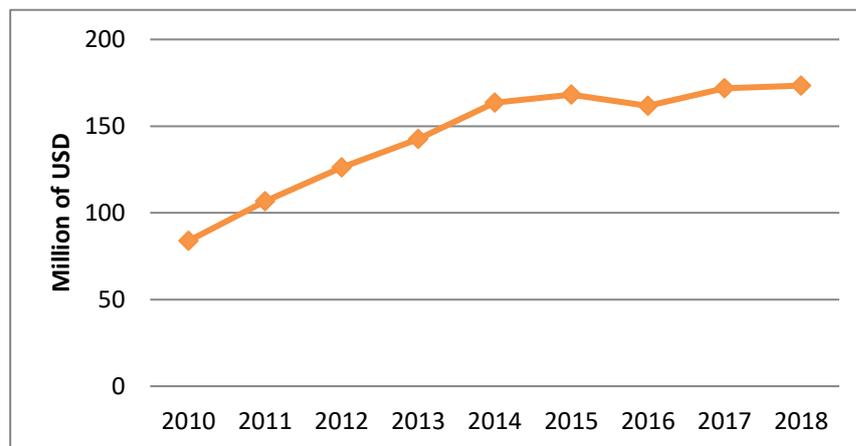
Gambar 1.4
Tren Realisasi APBD Provinsi di Indonesia
tahun 2010-2017

Dari gambar 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah APBD semakin meningkat, diikuti dengan peningkatan pendapatan dan belanja juga. Peningkatan APBN maupun APBD ini menyebabkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan maka terjadilah defisit, defisit ini perlu ditutupi oleh pemerintah. Sebab-sebab terjadinya defisit anggaran yaitu terdiri dari mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana pengeluaran karena Inflasi (Barro dalam Anwar, 2014).

Defisit tersebut sangat wajar terjadi apalagi pada negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun daerah, apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengadakan pembangunan dalam bidang infrastruktur dimana memerlukan dana yang cukup besar, jika hanya memanfaatkan pendanaan dari pendapatan negara hal itu tidak akan cukup, dan

untuk mengatasi defisit ini pemerintah melakukan pinjaman kepada luar negeri untuk mempercepat proses pembangunan. Pinjaman ini atau yang sering kita sebut dengan pinjaman luar negeri adalah sebagian atau total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima pinjaman luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia (Ulfa, 2017).

Dengan meningkatnya APBN atau APBD dari tahun ke tahun maka nilai defisit akan semakin besar, dan pinjaman luar negeri juga akan semakin besar jumlahnya.



Sumber : Statistik Pinjaman luar negeri Indonesia, 2018

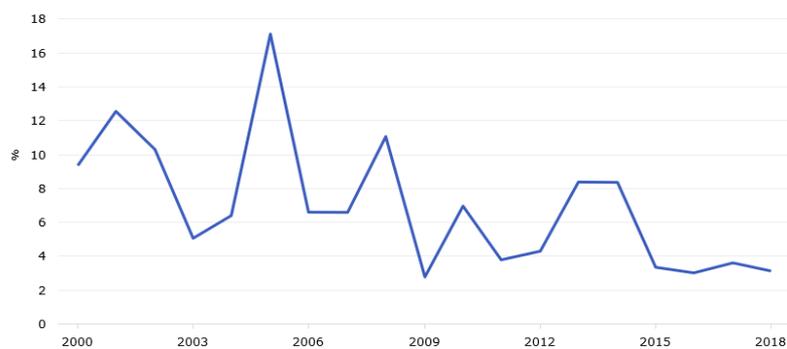
Gambar 1.5
Pinjaman luar negeri Indonesia Periode 2010-2018

Dari gambar 1.5 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pinjaman luar negeri Indonesia semakin meningkat, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan menurunnya jumlah pinjaman luar negeri di sektor swasta sehingga pada tahun tersebut pinjaman luar negeri mengalami penurunan (Bank

Indonesia, 2017). Dari kenaikan pinjaman luar negeri tersebut maka bunga dalam pembayarannya akan ikut meningkat sehingga akan semakin membebankan kepada APBN. Dalam praktiknya, pinjaman luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk belanja pembangunan. Sebagian utang malah dipakai untuk menutup cicilan pokok dan bunganya.

Selain defisit APBN terdapat juga defisit pada APBD dalam melaksanakan proses pembangunan, namun pemerintah daerah tidak dapat meminjam secara langsung kepada luar negeri karena akan menumpuk utang yang terjadi, sehingga pemerintah pusat memberlakukan dana hibah daerah yang dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa, dimana hibah daerah yang berasal dari pemerintah bersumber dari APBN, meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri, serta pinjaman luar negeri. Untuk hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, Menteri teknis/pimpinan lembaga mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dan/atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang diterbitkan oleh Bappenas (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016). Sehingga tidak semua daerah dapat atau berhak menerima dana hibah dari pemerintah yang sumbernya dari pinjaman luar negeri.

Dalam proses pembangunan ini juga tidak luput dengan adanya kenaikan harga-harga atau yang sering kita sebut dengan inflasi. Di Indonesia laju inflasi selalu diatur oleh Bank Sentral agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Laju inflasi ini dapat berpengaruh pada pemerataan pendapatan.



Sumber : Katadata, 2018

Gambar 1.6
Laju Inflasi Indonesia

Dari gambar 1.6 tersebut dapat dilihat dari tahun ke tahun tingkat inflasi semakin menurun, namun pada tahun 2005 tingkat inflasi berada di titik paling tinggi mencapai 17%, hal itu disebabkan adanya kejutan yang sangat besar yaitu kenaikan harga BBM yang mengakibatkan adanya lonjakan inflasi (Bank Indonesia, 2018).

Dari ketiga indikator tersebut yaitu pengeluaran pemerintah, pinjaman luar negeri dan Inflasi dapat dikatakan bahwa indikator tersebut menjadi salah satu pendorong dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga indikator tersebut dapat mempengaruhi kepada Ketimpangan Distribusi Pendapatan yang ada di Indonesia baik di nasional maupun daerah dalam hal ini pada tingkat Provinsi.

Ketiga hal tersebut yang sangat sering dibicarakan oleh masyarakat yaitu anggaran pemerintah yang terus naik, yang diikuti pinjaman luar negeri Indonesia yang setiap tahun juga meningkat menyebabkan penumpukan utang yang terjadi dan harga barang yang masih belum stabil yang sewaktu-waktu dapat naik dan

turun, ketiga hal tersebut sering sekali menjadi perbincangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tiga indikator tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini ditunjukkan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan data yang ada, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masih belum merata, yang mengakibatkan pada tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat masih belum sejahtera. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh apa yang terjadi antara pengeluaran pemerintah, pinjaman luar negeri, dan tingkat inflasi, terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus pada 34 provinsi yang ada di Indonesia, karena dilihat dari data yang ada di provinsi, tingkat ketimpangan pendapatannya masih belum merata, dan untuk mengetahui dan membuktikan apakah ketiga indikator tersebut dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau malah sebaliknya. Sehingga dibuat penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2009-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan Inflasi secara parsial terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2009-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan Inflasi secara parsial terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.
2. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2009-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang indikator yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai indikator yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat melengkapi kajian studi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di 34 Provinsi di Indonesia.

4. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dari studi pustaka bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dengan data sekunder adalah 34 Provinsi yang ada di Indonesia periode 2009-2018.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dimulai dari awal bulan september 2019 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan/prodi Ekonomi Pembangunan dan penelitian diakhiri dengan ujian skripsi dan komprehensif.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2019-2020															
		September			Oktober			November			Desember			Januari		Februari	
1	Pengajuan Judul	■															
2	Observasi Awal		■														
3	Pembuatan Usulan Penelitian		■	■	■	■											
4	Seminar Usulan Penelitian							■									
5	Revisi Usulan Penelitian								■	■							
6	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	■	■								
7	Analisis Data									■	■	■					
8	Penyusunan Skripsi										■	■	■				
9	Sidang Skripsi													■			
10	Revisi Skripsi														■	■	